

# 3

## STUDI PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH SELATAN

Oleh: Ori Tri Hapsari Kaesmetan  
Universitas Nusa Cendana, Kupang KPU  
Kabupaten Timor Tengah

Editor: Dwi Windyastuti – Universitas Airlangga, Surabaya

### LATAR BELAKANG

Demokrasi secara etimologis berasal dari kata Bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang artinya kedaulatan. Abraham Lincoln (1809-1865) mendefinisikan demokrasi sebagai *Government of the people, by the people, and for the people*. Demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga, rakyatlah yang berhak membentuk pemerintahan untuk kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, demokrasi juga menghendaki bahwa pemerintahan yang terbentuk harus berorientasi pada pelayanan dan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak.

Dalam penerapan demokrasi, muncul satu pertanyaan besar mengenai bagaimana konsep demokrasi yang ideal itu dilaksanakan. Disinilah konsep pemilu diimplementasikan. Konsep demokrasi juga memerlukan pemilu sebagai alat implementasi dari prinsip-prinsip dasar berjalannya demokrasi.

Sebagai sebuah sistem, demokrasi memiliki beberapa syarat implementasi. Syarat-syarat inilah yang menjadi indikator berjalannya demokrasi. Indikator tersebut antara lain para pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas, hak untuk memilih yang inklusif, hak dipilih atau dicalonkan dalam pemilu, hak mendapat informasi alternatif, dan kebebasan berserikat.

Penerapan demokrasi dalam perspektif politik di Indonesia salah satunya dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut (Ramlan, 1992:181) pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal (1) angka (1) disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu tentu menjadi ruang bagi rakyat dalam memberikan hak untuk memilih secara langsung para wakilnya yang akan duduk di parlemen. Ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan mendorong perilaku memilih (*voting behavior*) masyarakat yang cerdas, rasional dan berkualitas.

Plano dalam Harahap (2009:3) mengatakan studi perilaku pemilih adalah studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum serta latar belakang mereka melakukan pilihan itu. Kecendrungan menitikberatkan pada makna kecondongan hati dan pikiran seseorang yang mengarah pada keputusan memilih pilihan politiknya. Sedangkan latar belakang menyangkut kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Ada banyak pertimbangan atau alasan mengapa seseorang menetapkan pilihannya kepada calon legislatif. Misalnya karena alasan ikatan kekerabatan/persaudaraan, alasan agama/etnis tertentu, alasan pendidikan, alasan ideologis kepartaian, bahkan alasan *money politic*. Selain itu juga terdapat alasan rasional yang didasarkan pada visi misi calon legislatif serta rekam jejaknya selama ini.

Pasca pemilihan umum 9 April 2014 sudah terdengar desas-desus yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana terdapat dua fenomena mencolok. *Pertama*, adanya kecenderungan masyarakat daerah pemilihan Timor Tengah Selatan memilih calon legislatif dengan latar belakang ikatan kekerabatan suku-suku dalam wilayah swapraja yang masih berpengaruh saat ini, wilayah domisili, dan hubungan kekerabatan. Sebelum terbentuknya Kabupaten Timor Tengah Selatan, pernah didiami oleh 3 (tiga) kerajaan atau swapraja yaitu Swapraja Mollo (OEnam), Swapraja Amanuban (Banam) dan Swapraja Amanatun (Onam). Semua suku asli di Kabupaten Timor Tengah Selatan tergabung di masing-masing swapraja ini.

Menurut tokoh adat dari tiga swapraja (Mollo, Amanuban, dan Amanatun) mereka berperan memperjuangkan para calon legislatif yang berasal dari suku-suku besar di wilayah keswaprajaan mereka. Mereka berupaya mempengaruhi bahkan mengultimatum kepada masyarakat yang masih loyal untuk memilih calon legislatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dari beberapa kalangan masyarakat biasa lebih condong memilih calon legislatif yang berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Merujuk data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 186.569.233 jiwa terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Namun, hanya 124.972.491 jiwa (67,99%) yang suaranya dianggap sah, sedangkan suara 61.596.742 jiwa (33,01%) dianggap tidak sah, bahkan Golput. Angka partisipasi pemilih dalam Pileg 2014 tampak menurun jika dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya tingkat partisipasi pada pemilu anggota legislatif tahun

1999 sebesar 92,6 persen, kemudian pada Pemilu 2004, tingkat partisipasi itu turun menjadi 84,1 persen, bahkan selanjutnya anjlok pada saat pemilu 2009 menjadi 70,9 persen.

Tabel 1.1

Angka Partisipasi Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih	Persentase
1	Alor	104.055	83,11%
2	Belu	87.052	68,15%
3	Ende	133.549	79,87%
4	Flores Timur	124.130	76,52%
5	Kota Kupang	148.444	81,41%
6	Kabupaten Kupang	158.709	80,03%
7	Lembata	49.153	83,08%
8	Manggarai	148.711	79,45%
9	Manggarai Timur	133.624	81,84%
10	Manggarai Barat	123.420	82,51%
11	Nagekeo	72.244	82,89%
12	Ngada	76.114	82,85%
13	Rote Ndao	68.388	78,22%
14	Sabu Raijua	38.564	80,08%
15	Sikka	155.087	75,00%
16	Sumba Barat	56.724	77,02%
17	Sumba Tengah	34.244	81,70%
18	Sumba Barat Daya	166.438	78,77%
19	Sumba Timur	114.074	75,29%
20	Timor Tengah Selatan	210.649	72,35%
21	Timor Tengah Utara	66.136	74,49%
Total		2.209.509	78,31%

(Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014)

Sebagai data pembandingan, menyimak data dari Tabel 1.2 dan 1.3 ada fakta yang membenarkan informasi di atas. Calon legislatif yang terpilih adalah John Army Konay (Mollo), Eldat M. M. Nenabu, SH (Amanatun), Ampera Seke Selan, SH (Amanuban), Drs. Herman Hendrik Banoet, M.Si (Mollo), Jefri Un Banunaek (Mollo), dan Aleta Kornelia Baun, SH (Mollo). Lima dari keenam caleg terpilih ini berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berikut data perolehan suara calon terpilih:

Tabel 1.2

Data Perolehan Suara Calon Terpilih

### Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapil TTS Tahun 2014

No	Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	John Army Konay	Nasdem	14.960
2.	Eldat M. M. Nenabu, SH	Golkar	13.023
3.	Ampera Seke Selan, SH	Demokrat	7.983
4.	Drs. Herman Hendrik Banoet. M.Si	Gerindra	9.047
5.	Jefri Un Banunaek	PKPI	5.020
6.	Aleta Kornelia Baun, SH	PKB	3.897

Sumber: KPU Provinsi NTT Tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.3, calon legislatif antara lain; Reny Marlina Un, SE (Amanuban), Lidya Banunaek, SE (Amanatun), Nerfils G. B. Lakapu (Amanatun) ketiganya bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang sesuai data kependudukan (KTP) masing-masing.

Tabel 1.3  
Data Perolehan Suara Calon Tidak Terpilih  
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapil TTS Tahun 2014

No	Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Reny Marlina Un, SE	Demokrat	6.234
2.	Lidya Banunaek, SE	Golkar	4.840
3.	Nerfils G. B. Lakapu	Gerindra	4.313
4.	Muhazir Syukur A.Md	PKS	1.949
5.	Ir. Halomoan Tambunan, Msi	Demokrat	1.225
6.	Bahrudin T. Djamaludin	PPP	107

Sumber: KPU Provinsi NTT Tahun 2014

## PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perilaku pemilih daerah pemilihan Timor Tengah Selatan dalam menentukan pilihan pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014?

2. Bagaimana aspek similaritas, atraksi (daya tarik kandidat) dan rasionalitas mempengaruhi perilaku pemilih daerah pemilihan Timor Tengah Selatan dalam menentukan pilihan pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014?

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan desain penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai informasi melalui kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bogdan dan Taylor, 1992:5). Metode ini digunakan untuk menggali lebih detail dan mendalam mengenai perilaku memilih wajib pilih di Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan dalam pada pemilu legislatif untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai salah satu Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **Informan**

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial (Bungin, 2007: 53). Untuk memilih informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) (Bungin, 2007: 53). Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas data dan ciri-ciri dari subjek yang diinginkan dengan cara *criterion sampling*. Memilih informan dengan kriteria tertentu dengan tujuan informan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dalam penelitian informan kunci dan situasi sosial yang akan diamati yaitu masyarakat Timor Tengah Selatan berdasarkan sampling.

Dasar pertimbangan penentuan informan bahwa perilaku pemilih senantiasa berhubungan dengan kecenderunga-kecenderungan masyarakat Timor Tengah Selatan untuk menentukan pilihan pada pemilihan legislatif untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014. Masyarakat di daerah pemilihan Timor Tengah selatan yang mengalami langsung peristiwa yang diteliti bisa memberikan informasi-informasi berkualitas sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan, sikap, perilaku, pandangan serta pendirian-pendirian informan. Wawancara mendalam akan dilakukan pada informan yang pertama kali mengikuti pemilihan umum calon legislatif. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental

dari seseorang. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

Hasil pengumpulan data dari wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi (Sugiyono, 2009: 329). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto atau gambar-gambar dan arsip mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat berada di lapangan.

### **Instrumen Penelitian**

Pada penelitian kualitatif ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Seluruh proses pengumpulan data, baik wawancara mendalam maupun diskusi kelompok terarah (DKT), dilakukan oleh peneliti. Peneliti berusaha mendapatkan informasi atau data sebanyak dan selengkap mungkin dari subjek penelitian sesuai dengan topik dan batasan yang tertuang dalam tujuan penelitian. Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan beberapa alat bantu yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif seperti kamera, alat perekam suara, dan alat tulis.

### **Keabsahan Data**

Menurut Moleong, kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu: (1) kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) kebergantungan (*dependability*), dan (4) kepastian (*confirmability*)". Dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam antara lain:

#### 1. Kepercayaan (*credibility*)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2009:270-276):

##### a. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Melalui peningkatan ketekunan tersebut, maka dilakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.

##### b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:330). Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

##### c. Analisis kasus negatif

Dalam penelitian berupaya mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data

yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

d. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

e. Mengadakan *member check*

*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Kebergantungan (*dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui *audit* oleh *auditor independent*.

3. Kepastian (*confirmability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal hingga akhir penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang berupa kalimat atau pernyataan yang diinterpretasikan untuk mengetahui makna serta untuk memahami keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam Sugiyono, (2009: 245), analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Kegiatan dalam analisis data dalam penelitian ini, yakni: pertama, kegiatan reduksi data (*data reduction*), pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data yang di dapat dari lapangan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema hingga polanya. Proses reduksi ini dilakukan secara

bertahap, selama dan setelah pengumpulan data sampai laporan hasil. Penulis memilah-milah data yang penting yang berkaitan dengan fokus penelitian dan membuat kerangka penyajiannya.

Kedua, penyajian data (*data display*), dimana data disusun kembali berdasarkan klasifikasi dan masing-masing dipisahkan. Kemudian data yang sama disimpan dalam satu tempat, masing-masing tempat dan diberi tanda.

Ketiga, data yang dikelompokkan pada kegiatan kedua kemudian diteliti kembali dengan cermat, dilihat mana data yang telah lengkap dan data yang belum lengkap yang masih memerlukan data tambahan, dan kegiatan ini dilakukan pada saat kegiatan berlangsung.

Keempat, setelah data dianggap cukup dan telah sampai pada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan simpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif sehingga penelitian ini tidak menguji hipotesis (akan tetapi hipotesis kerja hanya digunakan sebagai pedoman) tetapi berupaya mengabstraksikan data. Analisis dilakukan lebih intensif setelah semua data sudah memadai dan dianggap cukup, yang kemudian diolah dan disusun serta ditarik kesimpulan penelitian.

## **KERANGKA TEORI**

### **Konsep Demokrasi Elektoral**

Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata, yaitu “*demos*” dan “*kratos*” atau “*kratein*”. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *cratein* yang berarti memerintah, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat (Warren, 1963: 2), warga masyarakat yang telah terkonsep sebagai warga negara. Dengan demikian dilihat dari arti kata asalnya, demokrasi mengandung arti pemerintahan oleh rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda. Henry B. Mayo (1960: 70), memberikan pengertian demokrasi, sebagai:

*“A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.”*

Dari rumusan tersebut memberikan sifat pemahaman umum terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan;



2. Orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum;
3. Kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa.

Dari tiga sifat pemahaman umum tersebut di atas, suatu negara demokrasi mempunyai tiga pemahaman utama yang meliputi hakekat, proses dan tujuan demokrasi. Huntington (1995: 4), melihat demokrasi dalam tiga pendekatan umum yaitu: pertama, sumber wewenang bagi pemerintah; kedua, tujuan yang dilayani oleh pemerintah; dan ketiga adalah prosedur untuk membentuk pemerintahan.

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo, 1960: 70). Dengan kata lain demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama berdasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.

Secara umum, menurut Robert A Dahl dalam Gafar (2000:7) bahwa dalam sistem politik yang demokratis maka kontrol terhadap pemerintah dalam membuat keputusan tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus dipilih secara teratur melalui pemilihan yang adil, terbuka, dan ada pembatasan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan. Perlu juga dicatat bahwasannya terdapat hak memilih dan hak dipilih bagi warga negara yang telah memenuhi syarat (dewasa). Termasuk pula hak warga negara untuk mengekspresikan kebebasan politiknya termasuk mengkritik aparat kekuasaan negara. Disisi lain juga harus ada akses untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tertentu. Lalu pada akhirnya, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk membentuk dan bergabung ke dalam kelompok-kelompok yang otonom, termasuk bergabung dalam partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan mempengaruhi pemerintah.

Menurut Fatah (1997: 114) hampir semua sarjana politik sepakat bahwa pemilu merupakan satu kriteria untuk mengukur kadar politik sebuah sistem politik. Selain itu, pemilu merupakan hak rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis (IDEA, 200: 58). Hubungan demokrasi dan Pemilu dapat dirangkakan dalam sebuah kalimat; "Tidak ada demokrasi tanpa Pemilu". Tampaknya pemilu menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan demokrasi. Pemilu menjadi sebuah jalan bagi terwujudnya demokrasi. Tetapi mewujudkan pemilu yang demokratis bukanlah pekerjaan mudah sebab praktek pemilu pada akhirnya hanya digunakan sebagai sebuah perhelatan prosedural. Perhelatan procedural disini untuk pergantian kekuasaan atau untuk membentuk lembaga-lembaga politik. Oleh karena itu, pemilu pada akhirnya memerlukan

standard agar prakteknya tidak sekedar dijadikan prosedur formal pergantian kekuasaan.

Fatah (1997:15) mengungkapkan bahwa kaitan demokrasi dengan pemilu sangat erat. Namun pengkaitan pemilu dengan demokrasi hanya mungkin dilakukan jika pemilu dilakukan dengan mencerminkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sirkulasi kekuasaan. Menurut Macridis dalam Fatah (1997: 17) ada sejumlah persyaratan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, antara lain yaitu:

1. Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara, tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;
2. Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa. Pembatasan jumlah kontestan Pemilu yang hanya mempertimbangkan alasan yuridis formal dengan menafikkan perkembangan riil aspirasi masyarakat adalah sebuah penyelewengan dari prinsip ini politik, tetapi pemilu menjadi ajang yang partisipatif, kompetitif, terbuka, jujur, dan adil;
3. Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis;
4. Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan;
5. Ada komite atau panitia pemllihan yang independen;
6. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat;
7. Penghitungan suara yang jujur; dan
8. Netralitas birokrasi.

## **Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih**

### **1. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1994:4) dalam bukunya *No Easy Choice Politicall Participation in Developing Countries* memaknai partisipasi politik sebagai:

*“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective.* (partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi biasa bersifat individual atau

kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif)”.

Dalam definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik. Hal ini bisa dilihat seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan lobbyist professional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya. Dalam perspektif lain McClosky (1972:20) dalam *International Encyclopedia of the social sciences* menyatakan bahwa:

*“The term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum)”*.

Dalam perspektif pengertian yang generik, Budiardjo (1996:183) memaknai partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, dan mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

## **2. Perilaku Pemilih**

Perilaku pemilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik. Samuel P. Huntington (1990:16) berpendapat bahwa perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, dan mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Menurut Mahendra (2005:75), perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu. Kemudian, Kristiadi (1996:76) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasional pemilih atau disebut teori voting behavioral. Lebih lanjut Plano (1985:280) mendefinisikan

perilaku pemilih sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.

Sementara perilaku pemilih menurut Surbakti dalam Efriza (2012:480) adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan disini adalah untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Pemberian suara (*voting*) secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menentukan pendapatnya dan ikut dalam menentukan konsensus diantara anggota kelompok terhadap keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Berdasarkan pendapat yang diuraikan di atas, maka perilaku pemilih dapat diartikan sebagai sebuah tindakan seseorang maupun sekelompok orang (masyarakat) yang berkaitan alasan dan latar belakang seseorang yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan memilih.

Menurut Kristiadi (1994:76), penelitian mengenai perilaku memilih (*Voting Behavior*) dalam pemilu pada dasarnya mempergunakan beberapa pendekatan yang telah berkembang selama ini yakni:

### **1) Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa yang kemudian berkembang di Amerika Serikat, yang pertama kali dikembangkan oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Colombia (*Colombia`s University Bureau of Applied Social Science*), sehingga lebih dikenal dengan kelompok Colombia. Kelompok ini melakukan penelitian mengenai *voting* pada tahun 1948 dan 1952. Dari karya tersebut terungkap perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Dalam pendekatan ini, agama, pendidikan, jenis kelamin, faktor geografis, budaya serta variabel sosial adalah variabel yang dominan dalam mempengaruhi seorang pemilih dalam menentukan pilihannya.

### **2) Pendekatan Psikologis**

Pendekatan ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan Survei Universitas Michigan (*University of Michigan`s Survey Research Centre*) sehingga dikenal dengan sebutan kelompok Michigan. Hasil penelitian kelompok ini yang dikenal luas adalah *The Voter`s Decide* (1954) dan *The American Voter* (1960).

Pendekatan ini muncul karena timbulnya ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dinilai kurang dapat menjelaskan secara metodologis kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah sulitnya menentukan kriteria pengelompokan masyarakat dan mengapa suatu kelompok mendukung atau memilih partai politik tertentu. Hal itu bisa terjadi karena mazhab sosiologis hanya menjelaskan kecenderungan kelompok masyarakat mendukung partai tertentu. Selain itu, ada

kecenderungan bahwa semakin lama dominasi kelas/kelompok masyarakat tertentu terhadap partai politik tertentu tidak lagi mutlak.

Menurut mazhab ini terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pilihan seseorang yaitu keterikatan seseorang dalam partai politik, orientasi seseorang terhadap calon anggota parlemen, orientasi seseorang terhadap isu- isu politik.

### **3) Pendekatan Rasional**

Dalam memahami pendekatan rasional ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Pemilih tidak hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor situasional bisa merupakan isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan.

Firmanzah (2007:102) mengartikan pemilih sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi yang dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik.

Menurut Prihatmoko (2005: 46) pemilih yang merupakan bagian dari masyarakat luas bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok. Terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan, di mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu.

Sedangkan menurut Fatah dalam (Efriza, 2012:487), secara umum pemilih dikategorikan kedalam empat kelompok utama, yaitu:

1. Pemilih Rasional Kalkulatif, pemilih tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum menjatuhkan pilihannya.
2. Pemilih Primordial, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk kedalam tipe ini biasanya sangat mengganggu simbol-simbol yang mereka anggap luhur. Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili di perkampungan.
3. Pemilih pragmatis, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Biasanya mereka juga tidak begitu peduli dan sama sekali tidak kritis dengan integritas dan visi misi yang dibawa kandidat.
4. Pemilih emosional, kelompok pemilih ini cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan. Pilihan politik yang didasari rasa iba misalnya adalah pilihan yang emosional. Atau pilihan dengan alasan

romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan kandidat, misalnya juga termasuk kategori pilihan emosional. Kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan hawa atau pemilih pemula.

Surbakti (1999:145-146) menyatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam mengkaji alasan pemilih memilih kontestan tertentu dalam pemilihan diantaranya:

1. Pendekatan struktural yang melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial (struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial, agama, bahasa, dan nasionalisme), sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditawarkan oleh setiap partai.
2. Pendekatan sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. dimana pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan agama.
3. Pendekatan ekologis yang hanya relevan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial.
4. Pendekatan psikologi sosial berupa identifikasi partai dimana partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor lain.
5. Pendekatan pilihan rasional yang melihat kegiatan memilih merupakan produk kalkulasi untung dan rugi.

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakan bahwa perilaku pemilih oleh Newcomb dan Byrne dalam firmanzah (2012:99) menegaskan model yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya adalah model kesamaan (*similarity*) dan daya tarik (*attraction*). Menurut model ini setiap individu akan tertarik pada suatu hal atau seseorang yang memiliki sistem nilai dan keyakinan yang sama dengan dirinya sendiri. Dalam kata lain semakin semakin dua pihak berbagi karakteristik yang sama (*similarity*), akan semakin meningkat pula rasa tertarik (*attraction*). *Candidate Attractiveness* (daya tarik kandidat) menurut Markus Klein dan Ulrich Rosar dalam Arzheimer (2017:688) melihat daya tarik kandidat ini dalam beberapa aspek antara lain:

### **1. Daya tarik kadidat dari aspek psikologi sosial**

Psikologi sosial melihat daya tarik fisik seseorang sebagai aspek spesifik dari sumber daya manusianya. Hipotesis ini memiliki beberapa implikasi penting secara khusus, diasumsikan bahwa keindahan tidak semata-mata atau bahkan terutama di mata yang melihatnya namun ada kriteria yang dapat

dikelompokan untuk daya tarik manusia adalah satu-satunya cara untuk membenarkan perlakuan teoritis dan empiris terhadap fisik. Daya tarik sebagai atribut asriptif dari orang yang diteliti daripada memperlakukan daya tarik yang dirasakan secara subjektif sebagai atribut untuk berinteraksi dengan pasangan. Studi psikologis sosial pada kenyataannya membuktikan bahwa saat mengevaluasi daya tarik fisik seseorang biasanya ada konsensus yang sangat kuat di antara mereka yang melakukan evaluasi.

Penilaian daya tarik semacam itu tentu saja berkaitan dengan penilaian orang-orang dari jenis kelamin yang lain. Namun, telah ditunjukkan bahwa atribut yang diuraikan juga sangat penting saat mengevaluasi daya tarik orang dari jenis kelamin seseorang. Hal ini mungkin dapat dijelaskan oleh fenomena seleksi intra-seksual yaitu kompetisi untuk pasangan seksual dengan status tertinggi yang nilai mitranya menjadi standar utama untuk perbandingan antara jenis kelamin seseorang. Selain itu, hasil penelitian baru menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara orang heteroseksual dan homoseksual dalam hal standar daya tarik.

## **2. Daya tarik kandidat dalam ranah politik**

Konsensus daya tarik berarti bahwa pemilih pada awalnya mencapai kesimpulan yang sangat mirip mengenai daya tarik kandidat yang tampil dalam pemilihan. Perhatian daya tarik berarti bahwa pemilih lebih memperhatikan kandidat yang menarik yang lebih sering dilihat sehingga dapat mengingatnya dengan lebih jelas. Ini menjadi keuntungan pertama.

Terlepas dari ini, Stereotip kepentingan yang memicu keyakinan bahwa kandidat yang menarik lebih berkomitmen dan efektif dalam hal politik. Ini bisa menjadi keuntungan penting kedua. Sebagai hasil dari para pemilih yang belum membuat keputusan yang kuat pada hari pemilihan mungkin cenderung memilih kandidat yang menarik dan/atau partai yang mereka lihat pada saat mereka berada di tempat pemungutan suara. Ini bisa menjadi keuntungan penting ketiga. Akibatnya, kemungkinan meningkat bahwa kandidat yang menarik dan partai mereka akan mendapatkan lebih banyak suara pada hari pemilihan daripada pesaing mereka yang kurang menarik (daya tarik keunggulan kompetisi).

## **3. Daya tarik kandidat dari aspek empiris**

Dalam karya Efran dan Patterson (1974: 354) dinyatakan bahwa kandidat dari partai besar lebih menarik daripada kandidat dari partai kecil. Karena banyak kandidat dalam kelompok yang tidak menarik adalah anggota partai kecil, sulit untuk mengatakan apakah kelompok kandidat ini kehilangan suara karena afiliasi partai mereka, atau penampilan mereka, atau karena keduanya. Sayangnya, tidak mungkin menganalisis secara bermakna efek penampilan sehubungan dengan kandidat partai besar saja karena variabilitas dari kedua penampilan dan perolehan suara sangat berkurang saat kandidat dikeluarkan berdasarkan afiliasi partai (Efran dan Patterson, 1974: 354).

Saat menganalisis data, faktor-faktor yang berpengaruh spesifik yang dipertimbangkan bersamaan dengan daya tarik fisik kandidat adalah jenis kelamin, usia, latar belakang imigrasi, judul aristokrat, gelar akademis, keanggotaan Bundestag yang ada pada saat pemilihan, Status selebriti dan afiliasi partainya. Pihak afiliasi menyerap perbedaan dalam dukungan yang diberikan kepada masing-masing pihak oleh pemilih yaitu, semua faktor khusus partai yang mempengaruhi hasil pemilihan atas dukungan calon pemilih. Selain itu, model tersebut memperhitungkan jumlah kandidat yang hadir untuk pemilihan Di bangsal masing-masing.

## **Konsep Pemilu dan Sistem Pemilu**

### **1. Pemilu**

Dalam kerangka ciri negara demokratis, Budiardjo (1999:58) mengemukakan ada tiga hal yang menjadi ukurannya adalah negara berdasarkan hukum, kontrol yang efektif kepada pemerintahan, pemilu yang bebas dan jaminan terhadap hak-hak demokratis. Sebagai proses politik, pemilu (election, general election) sangat berkaitan dengan partai politik. Dalam konteks ini, Blondel (1995:180) menyebut bahwa,

*“parties are the main link between people and government in the contemporary world. Elections are the key mechanism of this link: they are the only way in which the bulk of the population can express its support for a party rather than another”.*

Dalam rumusan Mariana dan Paskarina (2008:5), pemilu merupakan prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui pemilu sebenarnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan memperbarui kontrak sosial; memilih pemerintahan baru; dan menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru. Salah satu fungsi parpol di negara demokrasi adalah rekrutmen politik, dalam arti mempersiapkan kader terbaiknya untuk berjuang dalam kompetisi politik yang bernama pemilu sehingga mendudukkannya dalam berbagai jabatan publik. Terkait pemilu, Ball (1975:128) mengemukakannya sebagai *“the means by which the people choose and exercise some degree of control over their representatives”.*

Menurut Surbakti (1992:181) pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Lebih lanjut Surbakti (1999:181), menyebutkan ada tiga hal dalam tujuan pemilu yaitu, pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum. Kedua, sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga, merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang



dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Berdasarkan pada pendapat para ahli tersebut, tampak jelas bahwa pemilu merupakan salah satu karakteristik utama sekaligus instrumen sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Melalui pemilu inilah, rakyat memiliki momentum untuk menentukan pilihan politiknya kepada parpol tertentu untuk membentuk pemerintahan atau mengalihkan dan mempercayakannya kepada parpol lain. Secara konstitusional, di Indonesia hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi.

Selanjutnya amanat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditegaskan dalam undang-undang tersebut bahwa, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas; mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

## **2. Sistem Pemilu**

Di dalam ilmu politik, dikenal banyak sekali variasi bentuk sistem pemilu yang telah dipraktikkan oleh banyak negara. Nohlen (2008) mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan, dan perilaku pemilih. Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

Namun, apapun dasar pertimbangannya, sistem pemilihan umum yang ditetapkan harus memperhatikan serangkaian kondisi. Kondisi ini yang membimbing pemerintah dan partai politik guna menetapkan sistem pemilihan umum yang akan dipakai. Horowitz (2006: 114) menyatakan pemilihan sistem pemilihan umum harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Perbandingan Kursi dengan Jumlah Suara.
2. Akuntabilitasnya bagi Konstituen (Pemilih).
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan.
4. Menghasilkan pemenang mayoritas.

5. Membuat koalisi antar etnis dan antar agama.
6. Minoritas dapat duduk di jabatan publik.

Menurut Budiardjo (2007: 177) secara umum bentuk sistem pemilu tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan dua prinsip pokok saja, yaitu:

1. *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik); dan
2. *Multimember constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *propotional representation* atau sistem perwakilan berimbang).

Menurut Marijan (2010: 85-88) secara umum terdapat empat rumpun keluarga di dalam sistem pemilu yaitu, sistem pluralitas/mayoritas (*plurality/majority systems*), sistem perwakilan proporsional (*proportional representation systems*), sistem campuran (*mixed systems*), dan sistem-sistem yang lain (*other systems*).

Rumpun pertama adalah sistem distrik yakni transfer perolehan suara ke dalam perolehan kursi lebih didasarkan pada distrik atau daerah pemilihan. Pada sistem ini perolehan kursi didasarkan pada prinsip pluralitas (yang memperoleh suara terbesar) atau prinsip mayoritas (yang memperoleh suara terbanyak). Di dalam rumpun ini terdapat lima macam variasi sistem pemilu yaitu:

- 1) *First past the post* (FPTP)
- 2) *Two round system* (TRS)
- 3) *The alternative vote* (AV)
- 4) *Block vote* (BV)
- 5) *Party block vote* (PBV)

Rumpun kedua adalah sistem proporsional. Prinsip utama di dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional. Karena menganut prinsip proporsional maka sistem ini menggunakan *multimember district*. Dalam rumpun ini terdapat dua variasi dalam pemilihan, yaitu:

- 1) *List proportional representation* (List PR)
- 2) *Single transverable vote* (STV)

Rumpun ketiga adalah sistem campuran (*mixed system*). Sistem ini pada dasarnya berusaha menggabungkan apa yang terbaik di dalam sistem pluralitas/mayoritas dan di dalam sistem proporsional. Dalam rumpun ini terdapat dua variasi pemilihan, yaitu:

- 1) *Mixed member prortional* (MMP)
- 2) *Parallel system*

Selanjutnya rumpun keempat terdiri dari:

- 1) *Single nontransferable vote* (SNTV)
- 2) *Limited vote* (LV)
- 3) Borda count (BC)

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Pengetahuan Masyarakat Seputar Pemilu**

Sistem proporsional terbuka memungkinkan para pemilih dapat memilih calon legislatif menggunakan hati nuraninya. Banyak aspek yang menjadi bahan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah pengetahuan masyarakat seputar pemilu. Menurut peneliti ada dua hal untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemilu yakni pengetahuan masyarakat terhadap partai politik dan calon yang akan mewakili daerah pemilihan. Berkenaan dengan hal ini peneliti mendalami sejauh mana pengetahuan masyarakat Timor Tengah Selatan tentang pengetahuan terhadap partai politik.

Pemilu serentak pada 9 April 2014 dimaksudkan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 2112 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan 16,895 anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten. Sehingga total 20.389 orang yang akan dipilih untuk mewakili rakyat pada periode 2014-2019. Pemilu Legislatif tahun 2014 diikuti 12 partai politik nasional dan 3 partai lokal untuk Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan.

Di provinsi Nusa Tenggara Timur ke-12 partai politik selain partai khusus Aceh mengikuti pemilihan legislatif DPRD Provinsi tahun 2014 karena memenuhi syarat dalam tahapan pelaporan dana kampanye partai politik. Akan tetapi di beberapa daerah kabupaten termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan, Partai PDI Perjuangan tidak diikuti pada pemilihan legislatif 2014 karena tidak memenuhi syarat pelaporan dana kampanye partai politik (sumber: KPU Kabupaten).

Dari semua hasil penelitian memperkirakan sekitar 80% informan yang mengatakan hal yang senada. Ini memberi arti rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemilu itu sendiri. Budiardjo (1996:183) menegaskan partisipasi politik masyarakat menjadi hal penting karena seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (*public policy*). Keikutsertaan masyarakat ini membutuhkan peran partai politik, kandidat legislatif, dan penyelenggara Pemilu untuk menciptakan ruang yang dapat membentuk pemahaman masyarakat terhadap politik itu sendiri. Maka dengan pandangan ini kita dapat mengkoreksi fenomena bahwa tidak ada ruang yang cukup bagi masyarakat khusus daerah pemilihan Timor Tengah Selatan untuk mengakses informasi tentang pemilu. Pihak-pihak terkait hal ini tidak berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan mindset pemilu masyarakat.

### **2. Perilaku Pemilih dalam Memilih**

Perilaku memilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik dan

kandidiat legislatif yang akan dipilihnya. Berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat menggunakan hak pilihnya (perilaku memilih) bergantung pada keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan itu bisa saja memungkinkan seseorang bisa memilih tetap atau dapat juga menjadi penghambat seseorang tidak memilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih di daerah pemilihan Timor Tengah Selatan dapat terlaksana dalam keadaan-keadaan tertentu. Sehingga benar oleh (Arianto 2011:56-58) menjelaskan seseorang bisa saja tidak memilih pada pemilu karena beberapa faktor.

Pertama, faktor teknis. Kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluarrumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak.

Disisi lain terdapat teknis yang dapat di tolerir, maksudnya adalah permasalahan yang sifatnya sederhana dan melekat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.

Kedua, faktor pekerjaan. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang yang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

Ketiga, faktor eksternal dari aspek adminisistratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih.

Keempat, faktor sosialisasi, Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48

partai politik, pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti oleh 41 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Dan pemilu 2014 diikuti 15 partai politik (12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh). Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat.

Aspek selanjutnya adalah pengaruh aspek similaritas. Aspek ini lebih melihat adanya atraksi (daya tarik kandidat) dan rasionalitas terhadap perilaku pemilih. Aspek ini juga terdapat di daerah pemilihan Timor Tengah Selatan dalam menentukan pilihan pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014.

Berdasarkan paparan diatas penelitian ini lebih memfokuskan pada perilaku pemilih khususnya yang berkaitan dengan tingkat kepedulian (*awareness*) calon pemilih, partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif. Terlebih faktor proximitas/similaritas, atraksi (daya tarik kandidat) yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat Timor Tengah Selatan untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014. Sedangkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang dianggap penting oleh calon pemilih yang menjadi pertimbangan utama masyarakat memilih.

### **Proximitas dan Similaritas**

Didalam masyarakat multi etnis dengan ikatan erat dari berbagai suku agama, dan politik identitas tidak dapat dicegah kemunculannya dalam persaingan politik. Tentu saja kesukuan dan agama sangat mempengaruhi perilaku pemilih dan menjadi pertimbangan politik mereka. Pertimbangan politik berdasarkan kesamaan suku, agama, dan tempat tinggal dianggap tidak rasional dan tidak populer dalam demokrasi modern. Meski demikian perilaku pemilih berdasarkan kesamaan agama (keyakinan) atau mewakili kelompoknya (antar golongan), kesukuan, dan ras adalah hal yang lumrah di negara berkembang, bahkan ada yang lebih subjektif lagi yaitu memilih berdasarkan ketokohan. Secara sosiologis hal ini menjelaskan konteks sosial dengan latar belakang demografi dan sosial ekonomi. Secara psikologi hal ini juga menjelaskan keterkaitan antara pemilih terhadap partai politik yang ada atau kandidat tertentu.

Pada aras lokal dalam penyelenggaraan pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, proximitas menjadi peluang komoditas politik. Bahkan sisi ini menjadi prioritas dalam membangun agitasi politik kepada masyarakat disetiap wilayah di daerah pemilihan Timor Tengah Selatan. Peneliti menjumpai beberapa orang dan sebagian besar informan mengakui aspek kesamaan agama, suku, budaya, dan wilayah sebagai batu loncatan keberhasilan meraup suara sebanyak mungkin. Bagi mereka yang setuju, agama merupakan landasan mental spiritual yang sangat kuat, bagi umatnya berguna untuk menilai mana yang baik dan tidak, mana pimpinan yang baik dan tidak.

Pada dasarnya pemimpin merupakan panutan mereka, maka mereka akan memilih orang yang beragama sama. Sebagian besar pemilih lebih mengutamakan memilih dari orang yang beragama sama, alasannya adalah karena orang yang

beragama sama mempunyai ukuran kebenaran yang sama, hukum yang sama, dan jika berbeda agama maka akan berbeda pola pikirnya. Sementara mereka yang kurang dan tidak setuju harus selalu memilih dari agama sama memiliki pendapat bahwa agama bukan menjadi jaminan kinerja seorang bagus, yang mereka pilih adalah orang yang kapabel tidak bermasalah jika agamanya berbeda. Karakter pribadi seorang figur lebih menonjol ketimbang latar belakang agamanya. Peduli pada rakyat, visi misi atau program, dan kemampuan menghadapi masalah menjadi pertimbangan utama pemilih.

Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur kesamaan/similaritas didorong oleh beberapa faktor yakni: faktor kesamaan domisili/tempat tinggal; faktor kekerabatan/pertemanan; faktor suku asli (Mollo, Amanatun, Amanuban); faktor disarankan keluarga dan tetangga; dan faktor hubungan keluarga/familih.

### **PENUTUP KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini ada dua kesimpulan yang menjadi temuan penelitian. *Pertama*, pada prinsipnya pemilu dengan sistem proporsional terbuka semestinya membuka ruang bagi pemilih untuk memilih calon legislatif sesuai dengan pilihan nurani. Tetapi secara praksis, masyarakat Timor Tengah Selatan tidak memiliki akses untuk memperoleh pengetahuan seputar pemilihan legislatif (Pemilu 2014) yang berkenaan dengan partai politik dan para kandidat yang mengikuti pemilu. Situasi ini melatarbelakangi pemilih menentukan pilihan berdasarkan alasan-alasan tertentu. *Kedua*, masyarakat (pemilih) di daerah pemilihan Timor Tengah Selatan masih cenderung menggunakan pendekatan proximitas atau kesamaan suku, agama, tempat tinggal dan kekerabatan dalam menentukan perilaku memilih calon legislatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **REKOMENDASI**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan khususnya pada partai politik dan calon legislatif Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menciptakan sirkulasi kekuasaan untuk menghasilkan demokrasi yang sehat, maka dari itu perlu adanya peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat mulai dari dini. Instansi-instansi tersebut harus melakukan sosialisasi yang lebih tepat sasaran dan meluas lagi kepada masyarakat sehingga masyarakat yang berada di daerah terpencil pun memiliki wawasan politik dan referensi yang memadai terhadap calon legislatif dan mengetahui tahapan-tahapan pemilu. Bukan tanpa alasan, dalam konteks pemilu di Indonesia, selalu saja ada yang dipengaruhi dan mempengaruhi dalam prosesnya sehingga kesadaran individu untuk memilih calon yang ada bisa dibilang rendah. Karena ketika demokrasi ada dan kebebasan terbuka maka partisipasi politik akan sejalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Reynolds, et.al., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005) p.9-14.
- Arzheimer, dkk, 2017, *The SAGE Handbook of Electoral Behavior*, London EC1Y 1SP
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bugin. Burhan, 2007. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: kencana prenada media grup
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dieter Nohlen, "*Electoral Systems*" dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, *Encyclopedia of political communication*, (California: Sage Publications, 2008)
- Donald L. Horowitz, *Electoral Systems and Their Goals: A Primer for Decision-Makers, Paper on James B. Duke Professor of Law and Political Science*, Duke University, Durham, North California, January 2003.
- Efriza. 2012. *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Alfabeta, Bandung.
- Fatah, Eep, Saefulloh, 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firmanzah, 2007, *Marketing politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hermansyah, H.2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Seni dalam Memahami Fenomena Social*.Yogyakarta: Greentea Publishing.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba humanika.
- Huntington P. Samuel dan Joen Nelson. 1995. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kristiadi, J, (1994). *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia: Suatu Studi Kasus tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Pemilihan Umum tahun 1987-1992*, (Disertasi), Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Kushartono, 2006, *Perilaku Pemilih di kabupaten Sukabumi*.
- Kartono, Kartini.2009. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju

- Mariana Dede & Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- McClosky, Herbert. 1972. *Political Partisipation*, New York: The Macmillan Comperi
- Mahendra, A.A.Oka. 2005. *Pemilu Pilkada 2005 Pilkada Ditengan Konflik Horizontal*. Jakarta: Milenium Publisher
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Mayo B. Henry. 1960. *Nilai-nilai Demokrasi*, Garamedia. Jakarta, hal 165-191.
- Moleong L. J. ,2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Prihatmoko, Joko, J 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Print , Murray, (1999), *Civic Education For Society*. London, ASEAN Academic Press
- Riyanto, 2004. *Iklan Politik, era image, dan kekuasaan media*, jurnal Nirmana
- M, Saleh, Marzuki. 2007. *Belajar Untuk Pembangunan Masyarakat: Sejarah, Teori dan Prinsipnya*. Malang: FIP UM
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta .
- Surbakti, Ramlan 1992. *Memahami ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_,1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- \_\_\_\_\_,2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian )*. Surakarta: UNS.

#### Jurnal :

- Agustino Leo dan Yusoff Mohammad, 2009, Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol. 5 No. 1 2009
- Ferdian Ardi, 2014, *Analisis Perilaku Memilih pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Kranggan, Semarang Tengah)*, Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang.
- Hemay Idris dan Munandar Aris, 2016, Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih, *JURNAL POLITIK* VOL. 12 No. 01. 2016



Horowitz, Donald, 2006, *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia, Terjemahan Dari Constitutional Change and Democracy in Indonesia*, Alih Bahasa Dayanto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mayrudin Yeby Ma'asan, 2017, *Melacak Perilaku Memilih Masyarakat Yogyakarta Pada Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus di Desa Mlangi Kec. Gamping kab. Sleman Yogyakarta* Vol. 2 No. 2 (September-Februari 2017)

Valentina. Tengku. Rika, *Peluang Demokrasi dan Peta Perilaku Pemilih terhadap Partai Politik untuk Pemilu 2009 di Yogyakarta. Jurnal DEMOKRASI* Vol. VIII No. 2 Th. 2009

Internet :

<http://www.democracy-building.info/> diunduh pada tanggal, 8 Desember 2017

<http://dinamika-politik-menjelang-pemilu-2014.html> diunduh pada tanggal, 8 Desember 2017.

<http://ttskab.go.id/profil-daerah/sejarah/>

<http://ttskab.go.id/kondisi-umum/keagamaan/>

Surat Kabar :

*Tempo*, 12-18 Mei 2014, hal. 49.

### **BIODATA PENULIS**

**ORI TRI HAPSARI**, kelahiran Soe, 5 Oktober 1980. Pendidikan S1 Universitas Warmadewa, Denpasar, Jurusan Ekonomi Akuntansi dan lulus pada tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur dan lulus pada tahun 2018. Penulis sebagai PNS di KPU sejak 2010, saat ini ditempatkan di KPU Kabupaten Timor Tengah.